

ANALISIS PENGELOLAAN MUSEUM MULTATULI SEBAGAI PUSAT EDUTAINMENT DI KABUPATEN LEBAK

Sierfi Rahayu¹, Tiwi Rizkiyani², Yeni Khoirunnisa³, Dwisapto Yusuf Pradana⁴,
Fat'Chatu Chanifa Jikhan⁵, Muhammad Lukman Hakim⁶

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2,3,4,5,6}

e-mail: sierfirahayu@untirta.ac.id¹, tiwi.rizkiyani@untirta.ac.id², yenikhoirunnisa@untirta.ac.id³,
dwisapto.pradana@untirta.ac.id⁴, chanifa@untirta.ac.id⁵, muhammad.lukman@untirta.ac.id⁶

Abstract

This study aims to analyze the management of the Multatuli Museum as a community edutainment center in Lebak Regency through the framework of the POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) management function from George R. Terry. As the first anticolonial museum in Indonesia, the Multatuli Museum faces the challenge of balancing the function of historical preservation with the demands of modern recreational needs. The research method used was qualitative descriptive with data collection techniques through non-participation observation, interviews, and documentation studies with data analysis using interactive models from Miles, Huberman, and Saldana (2014). The results of the study show that the management of the Multatuli Museum as a community edutainment center in Lebak Regency has been running well through the implementation of a consistent POAC management function such as the planning aspect, there has been a clear determination of goals that are clearly proven by the vision and mission of the Multatuli Museum. The organizing aspect has prepared a clear organizational structure, but the allocation of resources is still lacking, especially the conservatorship section. The actuating aspect is good seen from leadership, authority and responsibility such as the educator is directed to be the guide for every tour activity carried out at the Multatuli museum. Finally, the aspect of controlling is good as seen from the report on the implementation of activities made every year, it can also be accessed by the public through the website, in addition to that there is a community satisfaction survey conducted by the multatuli museum.

Keywords: *Edutainment, POAC Management, Multatuli Museum*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Museum Multatuli sebagai pusat *edutainment* masyarakat di Kabupaten Lebak melalui kerangka kerja fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dari George R. Terry. Sebagai museum antikolonial pertama di Indonesia, Museum Multatuli menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan fungsi pelestarian sejarah dan tuntutan kebutuhan rekreasi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi non partisipasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Museum Multatuli sebagai pusat *edutainment* masyarakat di Kabupaten Lebak sudah berjalan dengan baik melalui penerapan fungsi manajemen POAC yang konsisten seperti aspek perencanaan sudah ada penetapan tujuan yang jelas dibuktikan adanya visi misi museum multatuli. Aspek pengorganisasian sudah melakukan penyusunan struktur organisasi yang jelas namun untuk pengalokasian sumber daya masih kurang khususnya bagian konservator. Aspek penggerakan sudah baik terlihat dari kepemimpinan, wewenang dan tanggungjawab seperti bagian edukator diarahkan menjadi pemandu setiap kegiatan tour yang dilakukan pada museum multatuli. Terakhir aspek pengawasan sudah baik terlihat dari laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat setiap tahun, bisa diakses juga oleh masyarakat melalui website, selain itu tersedia survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh museum multatuli.

Kata Kunci: Edutainment, Manajemen POAC, Museum Multatuli

A. PENDAHULUAN

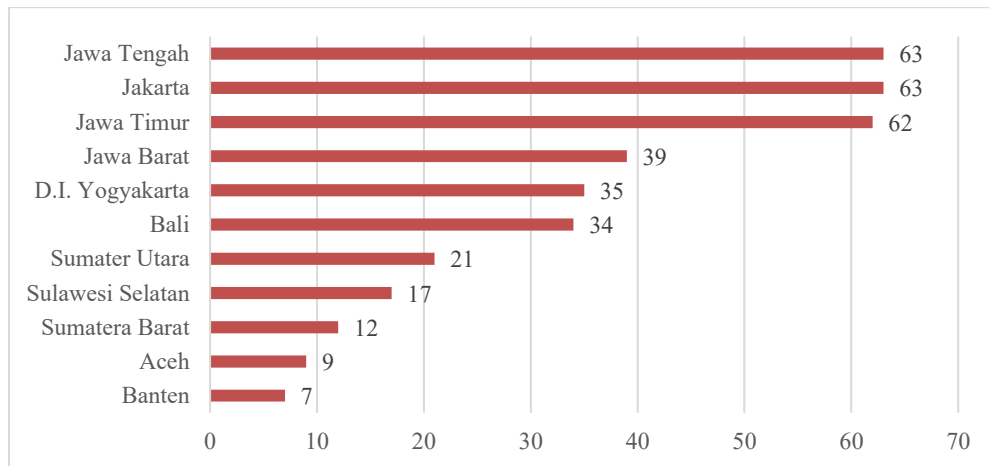
Kebudayaan memiliki peran penting sebagai identitas bangsa dan ketahanan nasional. Kebudayaan menjadi pilar keempat pembangunan berkelanjutan, selain ekonomi, sosial, dan lingkungan. Budaya bukan hanya sekadar warisan, melainkan sebagai penggerak utama pertumbuhan kreatif, kohesi sosial, dan adaptasi lokal yang penting dalam mencapai tujuan jangka panjang nasional. Secara spesifik, kebudayaan diatur dalam UUD 1945 Pasal 32. Dalam Pasal 32 Ayat (1) ditegaskan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Sedangkan, dalam Pasal 32 Ayat (2) ditegaskan mengenai adanya keberagaman bahasa di Indonesia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Kebudayaan bukan hanya perlu dijaga, namun juga perlu dimajukan keberlanjutannya agar tetap hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Dalam upaya memajukan kebudayaan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dalam upaya tersebut, dibutuhkan sebuah wadah berupa museum sebagai fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 disebut sebagai salah satu sarana dan prasarana kebudayaan selain ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Dalam hal ini, kaitan antara lembaga museum dan kebudayaan nasional beserta kebudayaan daerah yang unikum menjadi jelas, di mana museum adalah lembaga bagi kebanggaan perkembangan kebudayaan di tiap daerah di Nusantara (Munandar et al, 2011).

International Council of Museums (2022) mendefinisikan museum sebagai berikut: “*A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates, and exhibits, for purpose of study, education and enjoyment, material evidence of man and his environment* (museum adalah lembaga nirlaba, institusi permanen yang melayani masyarakat dan perkembangannya, dan terbuka untuk umum yang memperoleh, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan, untuk tujuan studi, pendidikan dan kesenangan, bukti material tentang manusia dan lingkungannya). Definisi tersebut menjadi standar global dalam

pembentukan dan pendirian museum yang diadaptasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum.

Saat ini museum telah bertransformasi dari gudang artefak menjadi ruang publik yang dinamis, interaktif, dan inklusif. Peran museum telah bergeser dari konsep tradisional yang kaku menjadi konsep modern yang partisipatif. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dalam masyarakat yang semakin dinamis seiring dengan perkembangan teknologi digital menuntut adaptasi museum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Museum tidak hanya dijadikan sebagai tempat penyimpanan benda-benda kuno dan bersejarah, melainkan sebagai ruang publik yang berfungsi sebagai pusat rekreasi edukatif (*edutainment*) yang menggabungkan hiburan dengan unsur pembelajaran. Sebagai pusat *edutainment*, museum dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan fungsi pelestarian yang kaku dengan pengalaman kunjungan yang menghibur. Fungsi museum juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, di mana museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, terdapat tiga aspek yang membentuk pondasi museum, yaitu objek koleksi, aspek komunikasi, dan aspek legalitas. Objek koleksi berupa benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata. Pada aspek komunikasi, museum tidak hanya berfungsi menyimpan objek koleksi tetapi wajib menyampaikan informasi dan nilai dari koleksi tersebut kepada publik. Dalam aspek legalitas, museum bukan penyimpanan milik pribadi tetapi merupakan institusi publik yang sah di mata hukum sehingga perlu dipenuhi persyaratan hukum untuk pendirian museum.

Indonesia hingga tahun 2025 tercatat memiliki 442 museum yang tersebar pada 33 provinsi, di mana sebagian besarnya terkonsentrasi di Pulau Jawa (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Adapun Provinsi Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur memiliki museum terbanyak di wilayah nusantara, sebagai berikut:



Grafik 1. Provinsi dengan Jumlah Museum Terbanyak di Indonesia Tahun 2025
 Sumber: Olah data Peneliti dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025

Jumlah museum di Indonesia menunjukkan tren yang positif, dari sekitar 290 museum pada tahun 2023 meningkat menjadi sekitar 442 museum pada tahun 2025. Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan (2025), 340 museum di Indonesia telah memiliki Nomor Pendaftaran Nasional dalam Sistem Registrasi Nasional dan dari jumlah tersebut, 245 museum telah memenuhi standar nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem permuseuman dan pelestarian sejarah serta budaya bangsa dari segi peningkatan kuantitas maupun kualitas. Namun, meskipun jumlah museum di Indonesia terus berkembang, persebarannya masih sangat didominasi pada wilayah Pulau Jawa. Berdasarkan Grafik 1, Jawa Tengah dan Jakarta memiliki jumlah museum yang paling banyak di Indonesia, yaitu 63 museum, disusul oleh Jawa Timur sebanyak 62 museum. Adapun Banten menjadi provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah museum paling sedikit, yaitu 7 museum. Sementara itu, jumlah museum di Indonesia bagian Timur masih sangat minim, padahal memiliki banyak benda bersejarah yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai koleksi museum. Keberadaan museum yang didominasi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa Pulau Jawa menjadi pusat pelestarian dan pengembangan museum nasional, namun juga menunjukkan ketimpangan akses terhadap pelestarian sejarah daerah di Indonesia. Hal ini sangat krusial bagi pelestarian museum karena tanpa penanganan yang tepat, maka benda-benda bersejarah akan mengalami degradasi fisik dan nilai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan museum di Indonesia bersifat konkuren, artinya terdapat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan skala dan kepemilikannya. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya disebutkan dalam Pasal 13 bahwa pembagian wewenang dalam pendaftaran, penetapan, dan pengelolaan situs atau benda yang akan menjadi koleksi museum

dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkat signifikansi sejarahnya (nasional, provinsi, atau lokal). Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Museum bahwa museum dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang (swasta). Dengan demikian, daerah memiliki kewenangan penuh atas otonomi narasi sejarah dengan menentukan identitas museumnya dan memiliki tanggung jawab hukum atas keamanan dan konservasi sehingga daerah berperan menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan sejarah mereka sendiri.

Provinsi Banten tercatat sebagai provinsi dengan jumlah museum paling sedikit di Pulau Jawa. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen dalam meningkatkan pengelolaan museum melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2043 yang mengatur penetapan kawasan cagar budaya dan infrastruktur penunjang pariwisata sejarah. Selain itu, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai payung hukum utama untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek kebudayaan, termasuk lembaga kebudayaan seperti museum. Selain itu, komitmen dari kota dan kabupaten di Provinsi Banten sudah ditunjukkan dengan adanya keberadaan regulasi daerah mengenai permuseuman, sebagai berikut:

Tabel 1. Regulasi Daerah Mengenai Permuseuman di Provinsi Banten

No.	Kota/Kabupaten	Regulasi Daerah
	Provinsi Banten	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2043 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah
1	Kota Serang	Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya
2	Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda ▪ Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah
3	Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan ▪ Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

No.	Kota/Kabupaten	Regulasi Daerah
4	Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ▪ Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha ▪ Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 435 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan
5	Kabupaten Serang	-
6	Kabupaten Tangerang	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kebudayaan Daerah
7	Kabupaten Pandeglang	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah
8	Kota Cilegon	Peraturan Walikota Cilegon Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

Sumber: Olah Data Peneliti, 2026

Tabel 1 menunjukkan adanya regulasi daerah sebagai komitmen pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Banten dalam pengelolaan permuseuman, meskipun belum ada peraturan daerah ataupun peraturan teknisnya yang secara khusus menyebutkan nomenklatur pengelolaan museum. Regulasi-regulasi daerah tersebut secara umum menyebutkan museum sebagai bagian dalam kepariwisataan, kebudayaan, dan cagar budaya secara integratif. Adapun persebaran museum di Provinsi Banten sebagai berikut:

Tabel 2. Persebaran Museum Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2025

No.	Kota/Kab	Nama Museum	Jenis Museum	Tipe Museum	Pemilik	Pengelola
1	Kota Serang	Museum Negeri Banten	Museum umum	Belum memenuhi standar	Pemerintah Provinsi Banten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
		Museum Situs Keperbukalaan Banten Lama	Museum umum	Tipe C	Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII
		Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia	Museum khusus	Belum memenuhi standar	Fauna Putra Prayoga	Yayasan Syariful Ichsan
2	Kota Tangerang	Museum Universitas Pelita Harapan	Museum khusus	Tipe C	Yayasan Universitas Pelita Harapan	Universitas Pelita Harapan
		Museum Benteng Heritage	Museum khusus	Tipe B	Yayasan Benteng Heritage	Yayasan Benteng Haritage
3	Kota Tangerang Selatan	Museum Tari dan Musik Nusantara	Museum khusus	Belum memenuhi standar	H. Luluk Sumiarso	Yayasan Rumah Puspo Budoyo

No.	Kota/Kab	Nama Museum	Jenis Museum	Tipe Museum	Pemilik	Pengelola
4	Kab. Lebak	Museum Multatuli	Museum umum	Tipe B	Pemerintah Kabupaten Lebak	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, UPT Museum Multatuli
5	Kab. Serang	-	-	-	-	-
6	Kab. Tangerang	-	-	-	-	-
7	Kab. Pandeglang	-	-	-	-	-
8	Kota Cilegon	-	-	-	-	-

Sumber: Olah Data Peneliti dari Sistem Registrasi Nasional Museum Kementerian Kebudayaan RI, 2026

Berdasarkan Tabel 2, Provinsi Banten tercatat memiliki 7 museum yang tersebar pada 3 kota dan 1 kabupaten, yaitu 3 museum di Kota Serang, 2 museum di Kota Tangerang, 1 museum di Kota Tangerang Selatan, dan 1 museum di Kabupaten Lebak. Sementara itu pada 4 wilayah administratif lainnya, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon tercatat tidak memiliki museum. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam persebaran sarana edukasi budaya dan sejarah di Provinsi Banten. Namun demikian, Provinsi Banten tidak hanya berkomitmen dalam peningkatan kuantitas museum, tetapi juga berkomitmen dalam peningkatan kualitas museum melalui serangkaian upaya revitalisasi, tata kelola, dan akreditasi untuk memastikan museum memenuhi standar nasional. Akreditasi atau standardisasi museum dikategorikan ke dalam tiga tipe, yaitu Tipe A, B, dan C berdasarkan hasil evaluasi komprehensif yang mencakup kelembagaan, koleksi, konservasi, edukasi, dan sarana prasarana. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, pada Pasal 23 disebutkan skor penilaian standardisasi museum sebagai berikut:

Tabel 3. Skor Penilaian Standardisasi Museum

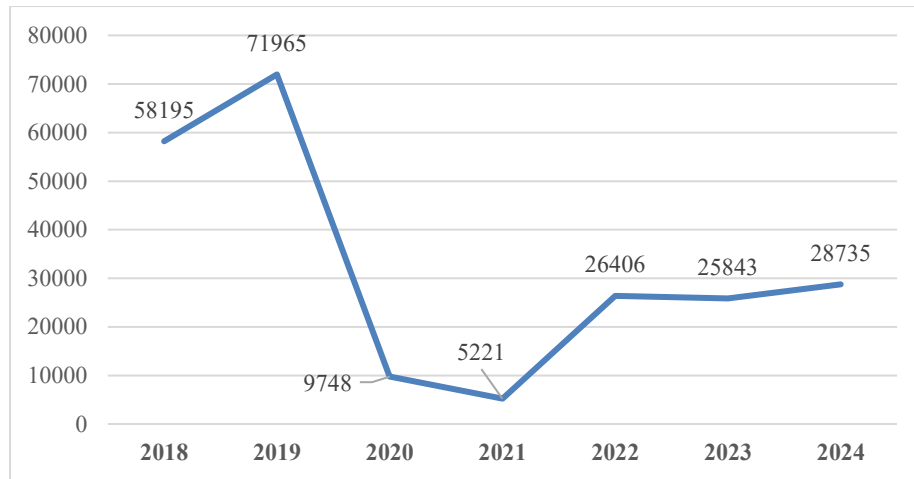
Tipe	Skor	Keterangan
Tipe A	86.66 – 100	Museum dengan standar sangat baik/terakreditasi A, biasanya memiliki manajemen profesional, koleksi terawat, dan program edukasi aktif
Tipe B	70.00 – 86.65	Museum dengan standar baik/terakreditasi B, umumnya memiliki konservator dan berpengalaman
Tipe C	55.0 – 69.99	Museum dengan standar cukup/terakreditasi C, yang memerlukan peningkatan standar
Tidak Memenuhi Standar	> 60.00	Secara administratif belum mampu memenuhi standar

Sumber: Olah Data Peneliti dari Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022, 2026

Standardisasi museum dilakukan untuk memastikan bahwa sebuah museum benar-benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelestarian, pendidikan, dan riset, bukan sekadar tempat menyimpan barang lama. Standardisasi museum dilakukan berdasarkan pengelolaan museum terhadap: (a) Kelembagaan museum; (b) Pengelolaan koleksi; (c) Peningkatan sumber daya manusia; (d) Pengembangan museum; dan (e) Pemanfaatan museum. Standardisasi museum sangat penting untuk menjadi syarat memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), adanya jaminan pelestarian koleksi sebagai tuntutan standar penyimpanan, dapat meningkatkan kualitas edukasi karena wajib memiliki kurator dan edukator, meningkatkan standar pelayanan publik, dan membangun kepercayaan atau *networking* sehingga lebih mudah dalam melakukan kerjasama antar museum. Dengan adanya standardisasi, museum menjadi lembaga kebudayaan yang hidup, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dari 7 museum yang ada di Provinsi Banten, 3 museum tercatat belum memenuhi standar, 2 museum terkategori Tipe C, dan 2 museum terkategori Tipe B, yaitu: (1) Museum Benteng Heritage di Kota Tangerang dengan pemilik dan pengelola perseorangan; dan (2) Museum Multatuli di Kabupaten Lebak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melalui UPT Museum Multatuli. Museum Multatuli telah berhasil naik kelas menjadi Museum Tipe B yang menunjukkan komitmen dalam peningkatan kualitas museum.

Museum Multatuli tercatat dalam salah satu cagar budaya di Kabupaten Lebak berlokasi di Jalan Alun-Alun Timur Nomor 8, Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak memiliki keunikan sebagai museum antikolonial pertama di Indonesia yang berfokus pada sejarah perlawanan terhadap ketidakadilan sistem kolonial melalui karya sastra. Berbeda dengan museum sejarah pada umumnya, Museum Multatuli secara khusus mengangkat narasi kritis terhadap kolonialisme dan dampak sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang terjadi di Lebak pada masa penjajahan Belanda. Selain itu, gedung Museum Multatuli merupakan gedung bekas Kawedanaan Rangkasbitung yang dibangun pada tahun 1923 dengan gaya arsitektur *Indische Empire* menambah kesan klasik dan megah yang memperkuat atmosfer historis dari masa kolonial. Museum Multatuli menyimpan koleksi sastra langka berupa cetakan pertama novel *Max Havelaar* berbahasa Prancis tahun 1868 serta litografi dan dokumen asli Eduard Douwes Dekker. Oleh karena itu, nama Museum Multatuli diambil dari nama pena Eduard Douwes Dekker yang menggunakan nama samaran "Multatuli" saat menulis *Max Havelaar*. Museum Multatuli tidak hanya merepresentatifkan sejarah lokal Lebak, namun juga menjadi simbol kritik kolonialisme, humanisme, dan kesadaran keadilan sosial.

Sejak diresmikan pada 11 Februari 2018 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tren kunjungan Museum Multatuli mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat dalam empat tahun terakhir, sebagai berikut:



Grafik 2. Perkembangan Jumlah Kunjungan Museum Multatuli Tahun 2018-2024

Sumber: Olah Data Peneliti dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Museum Multatuli 2024, 2026

Jumlah kunjungan Museum Multatuli meningkat hampir 19 persen sejak pertama kali diresmikan pada tahun 2018 dari 58.195 pengunjung menjadi 71.965 pengunjung pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan Museum Multatuli. Namun, pada tahun 2019-2021 terjadi penurunan kunjungan drastis dikarenakan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada saat pandemi *Covid-19* yang berdampak pada penutupan sektor pariwisata sementara, termasuk penutupan Museum Multatuli guna memutus rantai penyebaran virus. Museum Multatuli sempat ditutup total dalam beberapa periode, salah satunya pada Maret 2020 dan baru mulai beroperasi normal kembali secara bertahap pada pertengahan 2022. Tren pemulihan pasca pandemi yang konsisten hingga 2024 menunjukkan Museum Multatuli sebagai ikon budaya dan sejarah Kabupaten Lebak sukses menarik minat publik, bahkan berhasil melampaui target kunjungan. Pada tahun 2024, jumlah pengunjung mencapai 29.735 dari target 25.000 pengunjung, sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Kunjungan Museum Multatuli Tahun 2024

Bulan	Kriteria Pengunjung			Jumlah
	Umum	Pelajar	M mancanegara	
Januari	1.571	2.105	4	3.680
Februari	1.083	2.214	10	3.307
Maret	556	845	15	1.416
April	616	413	4	1.033
Mei	1.250	1.662	1	2.913
Juni	1.024	515	1	1.540
Juli	973	781	12	1.766
Agustus	788	983	10	1.781
September	667	1.298	2	1.967
Oktober	1.041	2.338	2	3.381
November	1.219	2.866	0	4.085
Desember	1.865	0	1	1.866
Total	12.653	16.020	62	28.735

Sumber: Olah Data Peneliti dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Museum Multatuli 2024, 2026.

Tabel 4 menunjukkan proporsi kunjungan Museum Multatuli pada tahun 2024 yang didominasi oleh pelajar sebanyak 16.020 pengunjung (55,75 persen). Sementara pengunjung umum sebanyak 12,653 (44,03 persen) dan pengunjung mancanegara sebanyak 62 pengunjung (0,22 persen). Dengan total 28.735 pengunjung, komposisi tersebut menunjukkan bahwa Museum Mutatuli berfungsi dominan sebagai pusat edukasi yang menjadi fondasi utama keberlangsungan museum sebagai institusi pendidikan sejarah dan menjadi destinasi wisata minat khusus yang populer bagi masyarakat luas dan wisatawan domestik. Sementara itu, meskipun kunjungan mancanegara jumlahnya paling kecil, namun menunjukkan bahwa nilai sejarah "*Max Havelaar*" memiliki daya tarik internasional.

Pada awal 2026, Museum Multatuli resmi ditetapkan sebagai Museum Tipe B oleh Kementerian Kebudayaan semakin meningkatkan kredibilitasnya sebagai destinasi nasional. Dengan status Tipe B tersebut, Museum Multatuli semakin diperkuat posisinya bukan sekadar tempat pameran, melainkan sebagai ruang diskusi, pembelajaran, dan penguatan identitas budaya yang inklusif. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Museum Multatuli.

Pertama, masih terbatasnya sumber daya manusia pengelola Museum Multatuli secara fungsional, terutama tenaga teknis. Museum Multatuli hanya memiliki 2 tenaga teknis pengelola koleksi, yaitu 1 kurator dan 1 edukator. Kondisi ini menyebabkan terjadinya beban kerja ganda (*double burden*) pada aspek teknis, di mana kekosongan posisi teknis lainnya menciptakan risiko operasional bagi keberlangsungan museum, salah satunya dalam penyelenggaraan program publik secara berkelanjutan.

Kedua, masih minimnya koleksi fisik Museum Mutatuli, terutama koleksi buku bacaan. Sebagai museum yang mengangkat narasi besar antikolonialisme, jumlah koleksinya masih tergolong minim. Hingga akhir tahun 2025, Museum Multatuli memiliki 277 koleksi yang telah teregistrasi. Dari jumlah tersebut, koleksi buku masuk dalam kategori filologika. Karena akses langsung buku sejarah yang masih terbatas di Museum Multatuli, untuk kebutuhan membaca atau riset, pengunjung diarahkan ke Perpustakaan Saidjah Adinda yang memiliki koleksi jauh lebih banyak.

Ketiga, minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Secara fisik, pemenuhan standar aksesibilitas penuh (seperti *guiding block* menyeluruh atau *lift*) masih menghadapi tantangan regulasi dalam menjaga keaslian bangunan lama (bekas kantor Wedana Lebak). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ditegaskan pada Pasal 77 Ayat 2 bahwa pemugaran harus memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan.

Museum pada umumnya bersifat edukatif (Koutoura, 2014), namun akan lebih baik jika pengetahuan tersebut disampaikan dengan metode yang menyenangkan sehingga bukan hanya sekedar memberikan informasi tetapi juga menciptakan pengalaman yang mengesankan bagi pengunjung. Untuk itu, pengelolaan Museum Multatuli perlu ditingkatkan dari aspek administratif menjadi pengelolaan teknis profesional yang substansial sehingga dapat menjadi lembaga yang profesional, mandiri, dan inklusif sebagai pusat *edutainment* masyarakat sehingga akan mengubah citra museum menjadi ruang publik yang hidup dan menyenangkan tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Status Museum Multatuli sebagai Museum Tipe B saat ini menjadi modal yang kuat untuk terus meningkatkan manajemen layanan dan pengalaman pengunjung. Dengan pengelolaan yang progresif, Museum Multatuli dapat membuktikan bahwa tempat bersejarah bisa menjadi ruang publik yang paling diminati dan menjadi destinasi wisata favorit di Kabupaten Lebak, bahkan di Provinsi Banten. Museum Multatuli tidak hanya akan diingat sebagai bangunan bersejarah, tetapi bertransformasi menjadi ikon modernitas Lebak yang tetap berakar pada identitas lokal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Prasetyo et al., (2021), pemanfaatan museum sebagai wisata edukasi dapat memberikan dampak positif baik dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran maupun pendapatan daerah. Museum merupakan sarana yang berperan penting dalam memperkuat identitas (Posha & Yusnita, 2023). Museum dapat menghubungkan manusia dari masa lalu ke masa kini, memungkinkan untuk belajar dan memahami sejarah peradaban manusia. Museum

adalah lembaga yang bersifat tetap dan tidak tergantung pada pemiliknya fungsinya mencakup hiburan, studi, dan penelitian, serta terbuka untuk umum demi kemajuan masyarakat (Direktorat Museum, 2007). Selain dokumentasi, edukasi publik yang terstruktur memegang peranan penting dalam upaya memberdayakan masyarakat (Imanulloh et al, 2012). Edukasi publik yang terstruktur memastikan transfer pengetahuan berjalan efektif, terukur, serta mampu menciptakan perubahan sikap atau perilaku pada sasaran pengabdian. *Edutainment* didefinisikan sebagai konvergensi pendidikan dan hiburan, yang terjadi dalam lingkungan digital. Penggunaan teknologi baru memungkinkan peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dengan menggabungkan unsur-unsur pendidikan dan hiburan. Namun, telah terjadi perdebatan mengenai praktik *edutainment* dan apakah praktik tersebut benar-benar berkontribusi pada proses pembelajaran. Pendidikan mulai dieksplorasi oleh para profesional museum dengan cara-cara baru, misalnya dengan lebih berfokus pada proses pembelajaran daripada hasil akhir, sebuah fakta yang memungkinkan eksplorasi pengalaman yang lebih mendalam, inilah sebabnya mengapa hiburan sangat sering digunakan di museum sebagai metode pendidikan, dengan kesadaran penuh bahwa pembelajaran paling baik dicapai dalam keadaan yang menyenangkan (Hooper-Greenhill, 1999).

Konsep pengelolaan menurut George R. Terry (2009) didefinisikan sebuah proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Terry mengartikan pengelolaan sama dengan manajemen yang didalamnya terdapat proses yang berkaitan satu dengan yang lain. Proses tersebut dikenal dengan prinsip-prinsip manajemen POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuacting* (penggerakan), *controlling* (pengawasan). Proses pengelolaan ini dimulai dari *planning* guna menetapkan sasaran jangka panjang, kemudian ditindaklanjuti dengan *organizing* guna mengalokasikan sumber daya serta menyusun struktur kerja yang jelas. Selanjutnya, tahap *actuacting* guna menggerakkan, memotivasi dan mengarahkan seluruh sumber daya. Tahap terakhir, *controlling* guna mengevaluasi dan melakukan koreksi berkala agar seluruh operasional organisasi tetap berjalan sesuai dengan telah direncanakan.

Pengelolaan museum sebagai pusat *edutainment* menjadi penting di era modern ini untuk mengubah citra museum menjadi ruang publik yang dinamis dan relevan bagi generasi muda. Sebagai pusat *edutainment*, museum bertransformasi menjadi ruang hidup yang aktif, menyenangkan, dan informatif. Dalam kaitannya dengan studi Administrasi Publik, pengelolaan museum sebagai pusat *edutainment* terletak pada pergeseran paradigma museum sebagai lembaga pelayanan publik yang harus dikelola secara profesional untuk memenuhi kepentingan masyarakat

luas. Museum dipandang sebagai penyedia layanan informasi dan edukasi. Sementara itu, konsep *edutainment* merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (pengunjung) di tengah modernisasi. Pengelolaan museum modern mencerminkan prinsip *New Public Governance* (NPG), di mana fokus museum beralih dari sekadar menjaga koleksi menjadi institusi yang berorientasi pada kepuasan kepentingan publik, aksesibilitas, dan keterbukaan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis pengelolaan Museum Multatuli sebagai pusat *edutainment* di Kabupaten Lebak. Teknik pengumpulan data melalui observasi non partisipasi, wawancara, dan studi dokumentasi dari beberapa dokumen dan penelitian terdahulu yang dijadikan data sekunder pendukung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini di analisis menggunakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (POAC) menurut GR. Terry (2009). Teori ini digunakan karena memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini, yaitu terkait pengelolaan Museum Multatuli. Pemilihan teori POAC dalam penelitian ini didasarkan pada strukturnya yang komprehensif dan sistematis sehingga mampu menganalisis seluruh siklus tata kelola Museum Multatuli secara mendalam. Teori ini sangat relevan untuk mengetahui proses pengelolaan lembaga publik dalam mentransformasi visi-misi menjadi program nyata, memudahkan identifikasi kendala di setiap tahapan manajerial, serta memastikan koordinasi aset dan sumber daya manusia berjalan selaras dalam mewujudkan konsep museum modern yang interaktif dan adaptif terhadap teknologi. Fungsi-fungsi manajemen dari GR. Terry (2009) tersebut dikorelasikan dengan standarisasi museum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum memberikan dasar hukum yang kuat bagi penelitian ini karena peraturan tersebut merupakan standar baku tata kelola museum di Indonesia. Dalam analisis ini, fungsi *planning* dan *organizing* dapat diselaraskan dengan persyaratan pendirian museum, seperti visi-misi, koleksi, dan ketersediaan SDM. Sementara itu, fungsi *actuating* dan *controlling* menjadi instrumen untuk menganalisis pemenuhan standar pelestarian, pelayanan, serta sistem pendaftaran koleksi secara nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis manajemen

internal, tetapi juga menganalisis kepatuhan dan kualitas Museum Multatuli terhadap regulasi pemerintah yang berlaku.

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan tahap pertama dari fungsi manajemen. Terry (2009) mendefinisikan perencanaan sebagai proses pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, serta membuat dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan memvisualisasikan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terry juga menekankan bahwa perencanaan adalah dasar dari fungsi manajemen lainnya (*organizing, actuating, controlling*), di mana tanpa perencanaan, maka tidak akan ada pedoman untuk melaksanakan kegiatan atau melakukan pengawasan.

a) Penetapan Tujuan

Museum Multatuli diresmikan pada 11 Februari 2018 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hilmar Farid bersama dengan Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya. Pendirian Museum Multatuli didasari oleh keinginan untuk menghadirkan pusat edukasi sejarah antikolonialisme pertama di Indonesia yang menghubungkan peristiwa lokal di Lebak dengan narasi global. Melalui sosok Eduard Douwes Dekker dengan mahakaryanya yang berjudul *Max Havelaar*, Museum Multatuli bertujuan merawat ingatan kolektif masyarakat mengenai dampak sistem kolonial sekaligus menjadi motor penggerak pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lebak. Berikut prasasti peresmian Museum Multatuli:



Gambar 1. Prasasti Peresmian Museum Multatuli
Sumber: Peneliti, 2026

Gambar 1 merupakan prasasti peresmian Museum Multatuli sebagai simbol identitas baru yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan museum sebagai pusat edukasi antikolonialisme pertama di Indonesia yang menempati eks

bangunan Kantor Wedana Rangkasbitung. Pemanfaatan bangunan eks Kantor Wedana Rangkasbitung sebagai lokasi museum merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melestarikan bangunan cagar budaya sebagai ruang publik yang edukatif dan rekreatif.

Peresmian Museum Multatuli menandai berdirinya museum bertema antikolonial pertama di Indonesia. Sebagai lembaga yang relatif baru, Museum Multatuli memerlukan pengelolaan strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai sejarah dengan konsep *edutainment* modern sesuai dengan standar nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum. Museum Multatuli menjadi sebuah lembaga yang memerlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan guna mempertahankan eksistensinya sebagai pusat literasi sejarah antikolonialisme di Indonesia. Dalam pengelolaannya, perlu perencanaan yang strategis dan berkelanjutan agar museum tetap relevan, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menjalankan fungsinya sebagai ruang publik yang edukatif sekaligus rekreatif. Pengelolaan yang terencana ini bertujuan agar Museum Multatuli tidak hanya menjadi tempat penyimpanan artefak, tetapi juga menjadi destinasi wisata edukatif unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif di wilayah Banten.

Fungsi perencanaan merupakan upaya untuk menetapkan tujuan dan memilih tindakan yang terencana agar dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu Tujuan-tujuan yang dimaksud dapat diaktualisasikan dalam wujud visi dan misi organisasi. Hal ini selaras dengan persyaratan dalam pendirian museum yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum pada Pasal 3 Ayat 1 Poin (a), bahwa pendirian museum harus memenuhi beberapa persyaratan, di mana salah satu syaratnya adalah memiliki visi dan misi. Dalam suatu organisasi, adanya visi dan misi bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan strategis menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, serta memberikan motivasi para anggota untuk mencapai tujuan organisasi.

Visi Museum Multatuli, yaitu menjadi pusat informasi ilmu pengetahuan sejarah perkembangan masyarakat Lebak dalam bentuk edukatif, rekreatif, dan atraktif serta mewujudkan museum sebagai pusat ekosistem kebudayaan di Lebak. Visi tersebut merupakan manifestasi nyata dari konsep Museum Modern yang bergeser dari sekadar penjaga artefak menjadi ruang hidup. Konsep inilah yang disebut *edutainment*, di mana mengubah cara pengunjung berinteraksi dengan koleksi, dari sekadar melihat menjadi mengalami. Adapun untuk mencapai visi tersebut, terdapat lima misi dari Museum Multatuli, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian dan dokumentasi, baik di bidang kesejarahan, sosial, dan budaya di Kabupaten Lebak;
- 2) Mengomunikasikan koleksi sebagai bukti dari sejarah Multatuli, kolonialisme, dan budaya di Kabupaten Lebak;
- 3) Menciptakan kegiatan dan menyediakan sarana edukasi yang rekreatif serta atraktif berbasis IT;
- 4) Melakukan kolaborasi dengan komunitas untuk menciptakan museum sebagai ruang kreasi dan berbagai kegiatan kesenian, baik di bidang kebudayaan dan sejarah;
- 5) Memberikan pelayanan prima untuk semua lapisan masyarakat.

Adanya visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa Museum Multatuli telah merumuskan tujuan dan tindakan yang terencana dengan jelas dan terarah. Visi dan misi organisasi merupakan alat untuk menyatukan langkah dan jati diri yang dimiliki oleh seluruh pengurus museum. Hal ini menjadi langkah yang penting dalam fungsi perencanaan karena dapat menjadi pedoman yang jelas bagi para pegawai museum dalam melakukan tindakan-tindakan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Visi dan misi Museum Multatuli yang dipublikasikan dalam *platform digital website* bertujuan untuk menjadikan museum sebagai pusat ekosistem kebudayaan dan pusat informasi ilmu pengetahuan sejarah di Lebak. Dengan mempublikasikannya secara luas, pihak museum juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan program edukasi agar tetap eksis dan relevan sebagai destinasi wisata sejarah yang mendidik. Dengan demikian, visi dan misi Museum Multatuli memiliki fungsi yang sangat penting dalam menentukan arah strategis dan standar operasional seluruh aktivitas museum.

b) Optimalisasi Sumber Daya

Optimalisasi sumber daya berkaitan dengan penggunaan dan pengaturan sumber daya secara efektif dan efisien, baik tenaga kerja (SDM), biaya, bahan/material, maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penggunaan sumber daya perlu dikelola dengan baik secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan organisasi.

Pada sumber daya manusia, Museum Multatuli melakukan perencanaan untuk menempatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian sesuai bidangnya, namun yang utama bukan hanya sekedar kuantitas atau jumlah sumber daya yang dibutuhkan, melainkan kualitas dan kompetensi (kualifikasi) yang sesuai dengan

kebutuhan spesifik tata kelola museum. Prinsip ini yang disebut dengan istilah “*the right man on the right place*”, di mana penempatan sumber daya manusia pada posisi atau jabatan sesuai dengan keahlian, bakat, dan latar belakang pendidikannya. Penetapan sumber daya manusia yang tepat menjadi faktor yang penting untuk menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki karena akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan berdampak pada tindakan-tindakan yang akan diambil dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, penempatan pegawai yang sesuai juga dapat meningkatkan produktivitas pegawai, optimalisasi kinerja, dan dapat mencapai prestasi kerja pegawai. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, Museum Multatuli memiliki 10 orang pengelola museum dengan *jobdesk*-nya masing-masing yang dipimpin oleh 1 orang Kepala Museum. Namun, jumlah pengelola Museum Multatuli masih terbilang minim jika melihat tren kunjungan yang meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Museum Multatuli menghadapi tantangan klasik manajemen, yaitu adanya kesenjangan (*gap*) antara kuantitas dan kualitas. Meskipun secara prinsip mengutamakan keahlian, namun keterbatasan jumlah personel dapat menghambat pelayanan jika tren kunjungan terus melonjak.

Pada sumber daya anggaran, biaya juga menjadi poin penting dalam optimalisasi sumber daya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, Museum Multatuli mendapatkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- untuk Program Pengelolaan Permuseuman dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Dengan anggaran tersebut, Museum Multatuli dituntut untuk melakukan efisiensi biaya (*cost efficiency*) agar kegiatan yang beragam tetap berdampak luas mengingat tren kunjungan yang meningkat namun jumlah staf terbatas. Perencanaan anggaran adalah jembatan antara visi Museum Multatuli dalam RPJMD dengan realitas operasional di lapangan agar tetap sasaran. Dalam konteks anggaran publik seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lebak, perencanaan anggaran Museum Multatuli harus bergeser dari sekadar penyerapan dana menjadi pencapaian nilai (*value for money*). Alokasi anggaran yang tepat akan berdampak pada ketepatan dan kesesuaian program-program yang akan dijalankan dalam periode tersebut. Alokasi anggaran dialokasikan untuk Program Pengelolaan Permuseuman yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan, diantaranya penyelenggaraan pameran koleksi atau tematik, penyelenggaraan forum diskusi publik yang melibatkan masyarakat, penyelenggaraan lomba-lomba yang melibatkan generasi muda dan pelajar, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Anggaran tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan operasional publik yang bertujuan meningkatkan kunjungan dan pelayanan edukasi kepada masyarakat Lebak. Ketepatan alokasi anggaran bukan hanya soal menghabiskan uang, melainkan memastikan setiap rupiah berkontribusi langsung pada peningkatan layanan museum bagi masyarakat Lebak.

Selain anggaran dan SDM, pengadaan fasilitas yang tepat seperti koleksi buku menjadi instrumen penting untuk memperkuat peran Museum Multatuli sebagai pusat literasi dan sejarah. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan koleksi buku-buku di Museum Multatuli. Kondisi koleksi buku di Museum Multatuli dapat dilihat dari dua kategori, yaitu koleksi artefak literatur yang dipamerkan di dalam museum dan koleksi perpustakaan publik yang berada di gedung pendukung (Perpustakaan Saidjah Adinda). Berikut merupakan beberapa koleksi buku di Museum Multatuli yang dipamerkan dengan keamanan yang ketat:



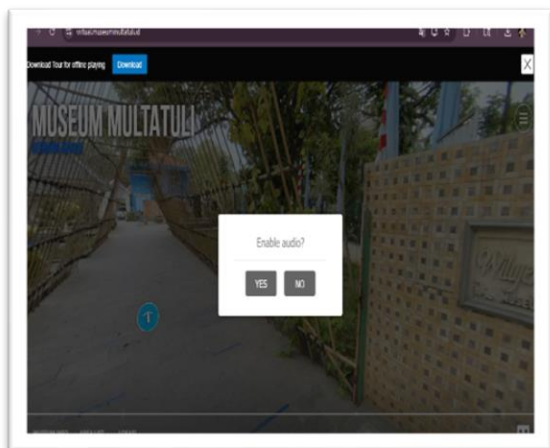
Gambar 2. Novel Max Havelaar Edisi Pertama Tahun 1868 Bahasa Prancis
Sumber: Peneliti, 2026



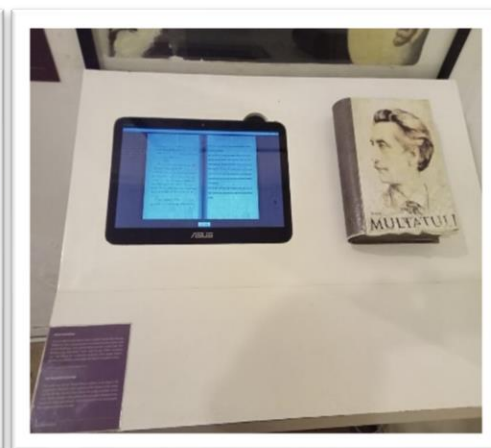
Gambar 3. Buku-Buku Karya Multatuli
Sumber: Peneliti, 2026

Koleksi buku di dalam ruang pameran berfungsi sebagai benda sejarah yang dirawat dengan standar konservasi ketat, diantaranya Novel *Max Havelaar* Edisi Pertama tahun 1868 dalam bahasa Perancis, surat-surat pribadi Multatuli, serta koleksi filologika yang memuat buku-buku tua karya Multatuli lainnya, seperti seri *Volledig Werk* dan *Meesterwerken van Multatuli*. Dalam penyajian beberapa koleksinya, Museum Multatuli sudah memanfaatkan teknologi digital dengan baik, diantaranya memanfaatkan *virtual museum/virtual tour* untuk mendigitalkan koleksi dan ruang pameran dan memudahkan pengunjung menjelajahi museum dari mana saja. Selain itu juga digunakan *Augmented Reality (AR) Virtual Guide* sebagai pengembangan aplikasi AR berbasis Android digunakan sebagai pemandu virtual yang memberikan informasi interaktif mengenai

koleksi, seperti novel Max Havelaar. Namun, aplikasi ini baru tersedia pada *handphone* android.



Gambar 4. Virtual Tour Museum Multatuli
Sumber: <https://virtual.museummultatuli.id/>



Gambar 5. Augmented Reality (AR) Virtual Guide pada Koleksi Novel Max Haveelar
Sumber: Peneliti, 2026

Adapun koleksi buku yang lebih lengkap berada di Perpustakaan Saidjah Adinda terletak di sebelah gedung utama Museum Multatuli menjadi pusat literasi pendukung memiliki puluhan ribu koleksi buku mencakup buku sejarah, sastra, hingga buku bacaan umum untuk pelajar dan mahasiswa. Secara keseluruhan, kondisi koleksi buku di Perpustakaan Saidjah Adinda sangat terawat dan terus dikembangkan untuk mendukung peran museum sebagai simpul wisata literasi di Kabupaten Lebak. Namun demikian, Museum Multatuli juga perlu melakukan perbaikan dalam manajemen inventarisasi, yaitu terkait buku induk dan registrasi data yang lebih detail dengan pemanfaatan teknologi digital untuk akuntabilitas data. Tanpa sistem inventarisasi yang detail dan terdigitalisasi, risiko kehilangan data sejarah atau kerusakan fisik tanpa rekam jejak menjadi sangat tinggi. Upaya perbaikan pada buku induk dan registrasi perlu dilakukan agar data tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi basis data ilmiah untuk keperluan riset dan edukasi di masa depan.

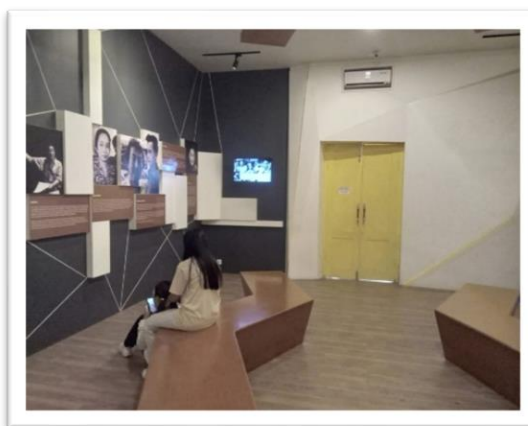
Selain koleksi museum, Museum Multatuli menyediakan fasilitas umum yang cukup lengkap, diantaranya: (1) Auditorium yang dapat digunakan untuk ruang diskusi publik, pemutaran film, atau pertemuan komunitas; (2) Sarana ibadah dan sanitasi menyediakan tempat wudhu, shalat, dan toilet; (3) Area terbuka berupa *plaza* atau halaman luas yang sering digunakan untuk acara lomba atau festival budaya. Untuk memudahkan mobilitas, terdapat petunjuk arah ke fasilitas umum sebagaimana berikut:



Gambar 6. Petunjuk Arah Fasilitas Umum
Sumber: Peneliti, 2026

Gambar 6 merupakan papan petunjuk arah ke fasilitas umum untuk memudahkan pengunjung dalam mengetahui lokasi dan mengakses fasilitas penting seperti toilet, tempat wudhu, mushola, atau area kantor pengelola. Selain itu, terdapat toko *souvenir* (*gift shop*) yang letaknya bersebelahan dengan museum, namun minat pengunjung untuk berbelanja di sana masih minim, salah satunya dikarenakan kurangnya promosi. Hal ini terjadi karena toko *souvenir* seringkali tidak ada yang menjaga akibat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak museum sehingga penjualan *souvenir* menjadi belum tereksplorasi secara maksimal.

Dalam menjaga kenyamanan dan pengalaman pengunjung serta menjaga keamanan koleksi, pengelola Museum Multatuli rutin mengadakan pemeliharaan museum dengan melakukan perbaikan fasilitas di beberapa area seperti pengecatan kayu baik di dalam maupun di luar museum, penambahan satu toilet dan tempat wudhu, perbaikan dinding yang keropos dan rusak, serta perbaikan pompa air. Tindakan pemeliharaan yang dilakukan tersebut menunjukkan upaya menjaga aspek fungsional dan estetika bangunan. Namun, karena museum ini menempati gedung bersejarah (bekas Kantor Wedana Lebak), maka proses perbaikan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip pelestarian. Berikut dokumentasi kondisi fisik Museum Mulatatuli:



Gambar 7. Kondisi Fisik Museum Multatuli
Sumber: Peneliti, 2026

Gambar 7 memperlihatkan kondisi fisik Museum Multatuli yang terawat dan terjaga kebersihannya sebagai upaya pengelola untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sehingga pengunjung memperoleh kesan mendalam terhadap Museum Multatuli. Namun demikian, Museum Multatuli belum sepenuhnya inklusif terutama bagi penyandang disabilitas.

Museum Multatuli secara bertahap berupaya menjadi museum yang inklusif bagi seluruh pengunjung, termasuk penyandang disabilitas. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, saat ini sudah tersedia sejumlah fasilitas dasar untuk mendukung aksesibilitas, seperti terdapat toilet khusus yang difungsikan untuk lansia dan penyandang disabilitas, penyelenggaraan kegiatan edukasi khusus, serta kemudahan informasi dengan penyediaan layanan tur virtual (*virtual tour*) dan informasi daring melalui situs resmi JIP untuk mempermudah akses bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik untuk datang langsung. Upaya inklusivitas yang dilakukan sejauh ini memang lebih banyak berfokus pada inklusivitas program daripada inklusivitas fisik sehingga akses fisik bagi penyandang disabilitas termasuk ketersediaan *ramp* di seluruh area masih perlu ditingkatkan.

Pengelolaan Museum Multatuli dapat berjalan dengan baik jika proses perencanaan disusun dengan matang dan terukur. Proses perencanaan menjadi tahap pertama dalam menyusun arah keberlangsungan Museum Multatuli sehingga menjadi poin kritis dalam menentukan masa depan museum. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya menjadi tahap krusial dalam proses perencanaan karena akan menentukan arah strategis dan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi urgen karena berdasarkan data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lebak Tahun 2025-2029, Museum Multatuli memberikan kontribusi terhadap Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Provinsi Banten. Adapun data terakhir IPK Provinsi Banten tahun 2023 sebesar 52,49 dengan nilai pada aspek warisan budaya sebesar 50,96. Kondisi ini menunjukkan bahwa Museum Multatuli tidak hanya menjadi pusat edukasi sejarah bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat rekreasi bagi masyarakat (*edutainment*) sehingga keberadaan Museum Multatuli memiliki peran yang penting dalam mendukung kebudayaan dan pariwisata daerah.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dari fungsi manajemen POAC. Fungsi pengorganisasian merupakan kegiatan dalam pengaturan dan penyusunan sumber daya pada suatu organisasi demi tercapainya tujuan, biasanya dengan membuat struktur organisasi dan pembagian divisi-divisi. Menurut Terry (2009), pengorganisasian adalah pembentukan hubungan perilaku yang efektif antar individu sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melakukan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Dalam fungsi manajemen POAC, pengorganisasian adalah jembatan yang mengubah rencana menjadi struktur nyata sebelum akhirnya digerakkan (*actuating*). Fungsi pengorganisasian sangat penting untuk menciptakan keselarasan struktur, membagi tugas secara jelas, dan mengalokasikan sumber daya agar rencana yang telah dibuat dapat dieksekusi secara optimal.

a) Pengalokasian Sumber Daya

Pada fungsi pengorganisasian, alokasi sumber daya memiliki perbedaan dengan optimalisasi sumber daya meskipun keduanya saling berkaitan. Optimalisasi sumber daya berfokus pada peningkatan efisiensi dari penggunaan sumber daya, sedangkan alokasi sumber daya berfokus pada pembagian atau penugasan sumber daya yang dilakukan oleh pegawai. Alokasi sumber daya meliputi alokasi sumber daya manusia, biaya, alat, maupun waktu yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola museum, dapat diketahui bahwa Museum Multatuli masih mengalami kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan museum. Hal ini menyebabkan adanya pembagian kerja yang kurang efektif, seperti pekerjaan ganda atau *double job*. Dalam alokasi sumber daya, pembagian kerja yang jelas, pengelompokkan pekerjaan, serta penetapan wewenang dan tanggung jawab sangat penting untuk dilakukan. Kurangnya sumber daya manusia dapat menghambat pekerjaan karena dapat

menciptakan ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia juga dapat menurunkan tingkat produktivitas pegawai dan menyebabkan hasil kerja yang tidak maksimal.

Museum Multatuli memiliki 11 orang sumber daya manusia pengelola mencakup 1 orang kepala museum. Jumlah ini dinilai masih kurang jika melihat tren kunjungan museum yang semakin meningkat tahunnya. Minimnya jumlah pengelola Museum Multatuli menyebabkan tumpang tindih pekerjaan atau *double job*. Kondisi ini dapat menimbulkan efek domino yang berdampak pada operasional museum, terutama menghambat pelayanan yang optimal bagi pengunjung museum apalagi ketika terjadi lonjakan pengunjung museum. Terjadinya *double job* dapat menyebabkan pegawai tidak fokus dalam menjalankan tugasnya, mendapatkan beban kerja yang lebih, melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugasnya. Selain itu, pegawai juga tidak fokus dalam memberikan perhatian penuh pada pelayanan museum. Beban kerja yang tidak spesifik membuat staf cepat lelah secara mental yang pada akhirnya akan menurunkan keramahan dan antusiasme dalam melayani publik.

Selanjutnya dalam proses koordinasi, adanya *double job* ini juga akan menyebabkan kurangnya komunikasi yang baik antar divisi. Hal ini terjadi karena proses penyebaran informasi yang tidak merata dan dapat menyebabkan pembagian kerja yang tumpang tindih antar pegawai. Alokasi sumber daya menjadi hal yang penting dalam menunjang optimalisasi sumber daya. Jika alokasi sumber daya sudah dilakukan dengan tepat, maka proses dalam optimalisasi sumber daya juga akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, alokasi sumber daya harus dilakukan dengan baik seperti pembagian kerja yang jelas sesuai tugasnya, melakukan pengelompokan pekerjaan, dan menetapkan tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, masalah seperti beban kerja yang *overload*, penurunan produktivitas pegawai, *double job*, dan sebagainya tidak akan terjadi dalam suatu organisasi.

b) Penyusunan Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan hierarki dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mengatur pembagian tugas dan wewenang serta alur perintah antar jabatan maupun divisi. Struktur organisasi memiliki fungsi untuk memperjelas pembagian kerja dan mempermudah proses koordinasi antar pegawai. Dengan adanya struktur organisasi, para pegawai dapat memahami posisi mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pegawai museum, menjelaskan bahwa sebelum tahun 2018 Museum Multatuli ini berada pada naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, namun sejak 2018 hingga sekarang berada di naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Maka dari itu, Museum Multatuli ini sekarang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh Museum Multatuli:

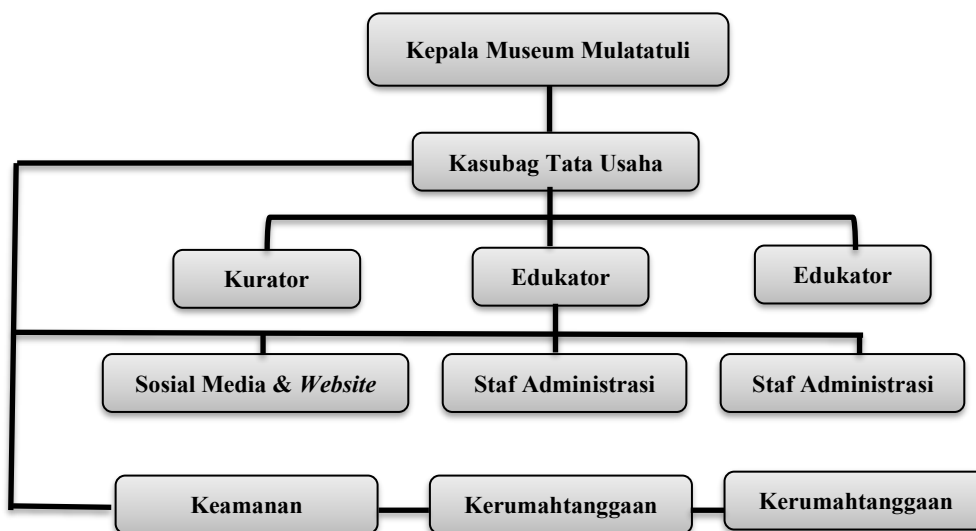


Diagram 1. Struktur Organisasi Museum Multatuli
 Sumber: Peneliti dari *Website* Museum Multatuli, 2026

Diagram 1 menunjukkan bahwa Museum Multatuli terdiri dari Kepala Museum yang membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa divisi dibawahnya, antara lain Kurator, Edukator, Sosial Media dan *Website*, Staf Administrasi, Keamanan, dan Kerumahtanggaan. Namun demikian, terdapat standardisasi museum yang harus dipenuhi oleh Museum Multatuli terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan museum. Standardisasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum. Berikut perbandingan pengelola museum berdasarkan pedoman museum:

Tabel 5. Perbandingan Pengelola Museum Mutatuli Berdasarkan Pedoman Museum

Pengelola Museum Berdasarkan Pedoman Museum	Jumlah Pengelola Museum Multatuli	Keterangan
Kepala Museum	1	1 Kepala Museum
Bagian Administrasi		

Pengelola Museum Berdasarkan Pedoman Museum	Jumlah Pengelola Museum Multatuli	Keterangan
Petugas administrasi mengelola ketenagaan, keuangan, surat-menyurat, kerumahtanggaan, pengamanan, dan registrasi koleksi.	6	1 Kasubag Tata Usaha 2 Staf Administrasi 2 Staf Kerumahtanggaan 1 Staf Keamanan
Bagian Teknis		
Tenaga Pengelola Koleksi (Register, Kurator) Melakukan inventarisasi dan kajian setiap koleksi museum	1	1 Kurator
Tenaga Konservasi (Konservator) Melakukan pemeliharaan dan perawatan koleksi	-	-
Tenaga Edukasi (Edukator) Penyampai informasi atau materi edukasi.	2	2 Edukator
Tenaga Preparasi (Penata Pameran) Menyiapkan sarana dan prasarana serta menata pameran.	-	-
Tenaga Bimbingan dan Humas Memberikan informasi dan mempublikasikan koleksi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.	1	1 Staf Sosial Media dan <i>Website</i>
Jumlah	11	

Sumber: Peneliti, 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 31, dijelaskan bahwa tenaga teknis museum terdiri dari register, kurator, konservator, penata pameran, edukator, dan hubungan masyarakat dan pemasaran. Dengan demikian, Museum Multatuli perlu melengkapi tenaga teknis untuk register, konservator, penata pameran, dan hubungan masyarakat dan pemasaran. Lebih lanjut, pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 51 disebutkan bahwa tenaga administrasi mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan museum di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keamanan, dan kerumahtanggaan. Dengan demikian, Museum Multatuli perlu melengkapi tenaga administrasi pada divisi kepegawaian dan keuangan. Kurangnya sumber daya manusia pada Museum Multatuli menyebabkan terjadi tumpang tindih pekerjaan yang pada akhirnya membuat para pegawai melakukan *double job* dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, Museum Multatuli perlu melengkapi ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan standardisasi museum agar seluruh pegawai dapat melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

3. *Actuating* (Penggerakan)

Fungsi penggerakan merupakan fungsi ketiga dari fungsi manajemen POAC. *Actuating* adalah fungsi manajemen yang sangat krusial karena merupakan tahap di mana semua rencana (*planning*) dan pengorganisasian (*organizing*) diwujudkan menjadi tindakan nyata. Menurut Terry (2009), *actuating* adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi pengarahan sebagai proses dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan. Proses mengarahkan, menggerakkan sekaligus memotivasi anggota organisasi melalui komunikasi secara efektif agar melakukan upaya, cara, dan teknik bekerja sebaik mungkin untuk mencapai tujuan.

a) **Kepemimpinan, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

Dalam fungsi pengarahan, pemimpin memiliki wewenang dalam mengarahkan pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan. Sebagai Unit Pelaksana Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, Museum Multatuli berkomitmen dalam mewujudkan museum sejarah yang dapat memberikan edukasi kepada para pengunjung dengan pendekatan interaktif. Melalui komitmen tersebut, pemimpin museum melaksanakan fungsi pengarahan yang bersifat humanisme kepada para pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan observasi, dapat diketahui bahwa divisi edukator melaksanakan tugas sebagai pemandu dalam kegiatan *tour* museum dengan baik. Edukator memberikan arahan dan informasi kepada para pengunjung dengan metode interaktif. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk melibatkan peran aktif dari para pengunjung dalam dialog kesejarahan. Berikut ini merupakan salah satu dokumentasi pelaksanaan *tour* museum dimana para pengunjungnya adalah sekelompok anak-anak. Berikut dokumentasi kegiatan *tour* museum di Museum Multatuli:



Gambar 8. Kegiatan *Tour* Museum di Museum Multatuli
Sumber: Peneliti, 2026

Tour museum merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan di Museum Multatuli dengan pelajar sebagai target pengunjung, baik pelajar tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan SMA. Keberhasilan *tour* pelajar sangat bergantung pada fungsi edukator museum. *Tour* pelajar di Museum Multatuli biasanya memiliki materi khusus yang berbeda untuk tiap jenjang pendidikan.

Dalam menarik minat pengunjung, Museum Multatuli menyediakan layanan reservasi yang dapat dilakukan melalui *website* untuk mempermudah dan mempercepat para pengunjung dalam memesan tiket museum. Hal tersebut menjadi salah satu bukti komitmen yang ditunjukkan oleh Museum Multatuli dalam fungsi kepemimpinan, wewenang, dan tanggung jawab, dimana terdapat arahan yang jelas dan alur perintah yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya sehingga para pegawai dapat menerima arahan tersebut dengan baik dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula.

b) Motivasi

Dalam fungsi penggerakkan, motivasi pegawai menjadi salah satu poin yang penting untuk dilakukan oleh pemimpin organisasi. Secara umum, motivasi merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan organisasi, motivasi tersebut diarahkan dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya motivasi, para pegawai akan meningkatkan kinerja mereka dan bekerja keras untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Motivasi pegawai di Museum Multatuli dilakukan dengan pendekatan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan rasa bangga akan prestasi. Pengembangan kompetensi pengelola Museum Multatuli

difokuskan pada penguatan peran edukator dan peningkatan standar pelayanan publik untuk mendukung statusnya sebagai museum Tipe B.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan, diantaranya dengan peningkatan kualitas edukator melalui pelatihan teknis pemanduan dan edukasi inklusif agar dapat melayani berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas; sertifikasi profesi teknis museum sebagai upaya standarisasi melalui sertifikasi nasional dari Kementerian Kebudayaan bagi tenaga teknis seperti kurator dan edukator untuk menjamin profesionalitas pengelolaan; pelatihan penulisan berbasis konten budaya lokal bagi staf agar mampu mengomunikasikan narasi sejarah antikolonialisme secara lebih menarik; serta pengembangan *storyline* dan riset dengan melibatkan pengelola museum dalam pengkajian ulang *storyline* dan riset sejarah kolonial untuk memperbarui materi edukasi agar tetap relevan dan tidak stagnan. Pencapaian status Museum Tipe B pada 30 Desember 2025 merupakan bukti nyata bahwa kombinasi antara pengembangan kompetensi dan motivasi kerja memberikan hasil yang optimal. Berikut sertifikat museum Tipe B yang diperoleh Museum Multatuli atas upayanya dalam meningkatkan standardisasi museum:



Gambar 9. Sertifikat Museum Tipe B pada Museum Multatuli
Sumber: *Website* DiskominfoSP Kabupaten Lebak, 2026

Gambar 9 menunjukkan bahwa Museum Multatuli berhasil meraih prestasi dengan predikat Museum Tipe B. Prestasi tersebut tentunya menjadi salah satu motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi mereka. Oleh karena itu, menumbuhkan rasa bangga akan prestasi juga sangat penting untuk dilakukan oleh pegawai, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja. Peningkatan status Museum Mutlatuli menjadi Tipe B tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan kolektif bagi seluruh pegawai, yang pada akhirnya akan

menjadi motivasi tambahan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas museum menuju Tipe A di masa depan.

Motivasi pegawai merupakan inti penggerak dalam fungsi pengarahan agar rencana-rencana yang telah disusun dalam organisasi dapat direalisasikan dalam aksi nyata. Dengan adanya motivasi pegawai, suatu organisasi dapat lebih mudah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Selain itu, motivasi yang timbul dari rasa bangga akan prestasi yang dimiliki oleh Museum Multatuli dengan menjadikan setiap capaian dan penghargaan institusi sebagai identitas kolektif yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

4. Controlling (Pengawasan)

Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari fungsi manajemen POAC. Menurut Terry (2009), pengawasan (*controlling*) adalah proses untuk menentukan apa yang telah dicapai (standar), mengevaluasi prestasi kerja, dan jika perlu, menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan sangat krusial karena merupakan proses untuk menjamin agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan, manajemen tidak akan tahu apakah tujuan organisasi benar-benar tercapai atau justru menyimpang, bahkan perencanaan yang hebat pun akan berisiko gagal jika tidak ada kendali terhadap pelaksanaan di lapangan.

a) Monitoring

Monitoring (pemantauan) merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk mengumpulkan data dan informasi selama sebuah kegiatan atau program sedang berjalan bertujuan untuk mendeteksi masalah atau hambatan secara dini agar bisa segera diperbaiki dan memastikan akuntabilitas penggunaan sumber daya organisasi. Monitoring dalam pengelolaan Museum Multatuli merupakan proses pengawasan rutin dan berkelanjutan yang dilakukan untuk memastikan seluruh operasional berjalan sesuai standar pelestarian cagar budaya dan pelayanan publik mencakup pemantauan harian terhadap kondisi fisik koleksi melalui kontrol suhu dan kelembapan ruang secara ketat, pengawasan kinerja edukator dalam menyampaikan narasi sejarah, hingga pemastian fungsi fasilitas multimedia dan keamanan area museum agar tetap prima bagi pengunjung. Melalui laporan berkala yang dihasilkan, monitoring berfungsi sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi kerusakan artefak maupun

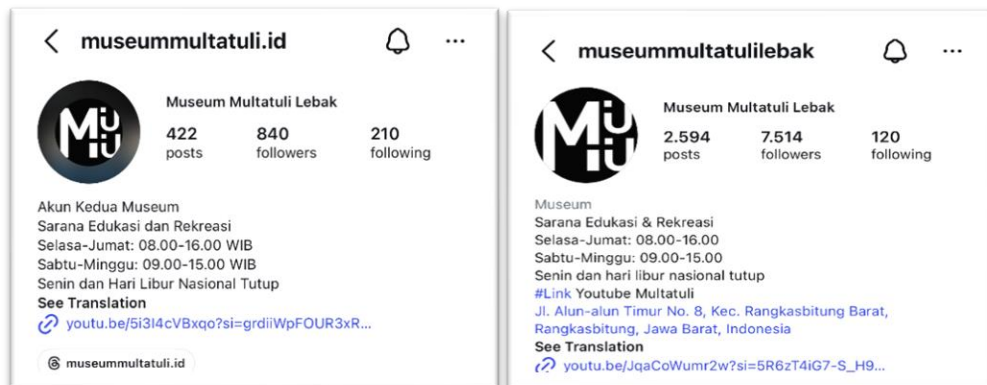
hambatan pelayanan, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil untuk menjaga integritas museum sebagai institusi memori kolektif yang akuntabel.

Museum Multatuli secara rutin menerbitkan laporan akhir tahun yang mencakup ringkasan kegiatan, kunjungan, dan program edukasi yang telah dilaksanakan, di mana laporan pelaksanaan kegiatan tersebut dipublikasikan melalui *website* Museum Multatuli sehingga dapat diakses oleh publik. Laporan publikasi tersebut penting untuk memenuhi asas akuntabilitas publik dan transparansi tata kelola museum. Berikut laporan pelaksanaan kegiatan Museum Multatuli yang rutin dipublikasikan pada *website* Museum Multatuli:



Gambar 10. Publikasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Museum Multatuli Tahun 2023 dan 2024
Sumber : Website Museum Multatuli, 2026

Laporan pelaksanaan kegiatan Museum Multatuli berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik dalam mengukur efektivitas program edukasi sejarah antikolonial serta pengelolaan koleksi yang dilakukan sepanjang tahun. Melalui dokumen ini, pengelola mendokumentasikan capaian jumlah pengunjung, transparansi penggunaan anggaran daerah, serta kendala operasional yang dihadapi sebagai landasan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan museum di masa mendatang. Selain itu, laporan ini menjadi arsip historis penting yang menjamin keberlanjutan visi museum dalam melestarikan nilai-nilai kemanusiaan Multatuli bagi generasi berikutnya. Namun, untuk laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 belum dirilis. Keterlambatan pembaruan (*update*) laporan menjadi kendala karena keterbatasan sumber daya manusia pengelola terutama untuk tenaga humas hanya 1 orang. Meski demikian, upaya untuk mempublikasikan informasi terbaru secara rutin pada akun *Instagram* resmi Museum Multatuli yang jauh lebih aktif memberikan *update* kegiatan harian yang tidak selalu tersedia pada *website*.



Gambar 11. Instagram Resmi Museum Multatuli

Sumber: Tangkapan Layar Peneliti, 2026

Instagram menjadi media sosial yang paling banyak dimanfaatkan publik sebagai platform visual utama dengan tingkat keterlibatan yang tinggi. *Instagram* berfungsi sebagai instrumen *monitoring* eksternal yang sangat efektif untuk memantau persepsi dan pengalaman pengunjung secara *real-time*. Melalui fitur seperti *tag*, *mention*, dan *location tag*, pengelola dapat melakukan pemantauan terhadap kualitas pelayanan dan kondisi fasilitas fisik di lapangan berdasarkan unggahan foto atau video pengunjung. Komentar dan pesan langsung (*Direct Message*) menjadi kanal monitoring untuk mendeteksi keluhan atau masalah teknis secara dini, sementara fitur *Instagram Insights* memberikan data berkala untuk memantau tren keterlibatan publik dan efektivitas narasi sejarah yang disampaikan. Dengan demikian, *Instagram* bukan hanya sekadar alat promosi dalam membangun citra, melainkan radar digital yang memberikan umpan balik langsung bagi manajemen untuk menjaga standar operasional museum melalui interaksi publik.

b) Evaluasi

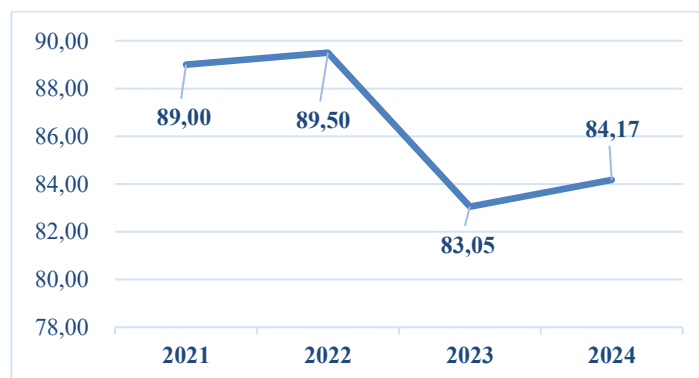
Dalam konteks pengawasan, evaluasi merupakan tahap penilaian sistematis yang dilakukan untuk membandingkan hasil kerja nyata dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan di awal. Jika monitoring bersifat memantau proses, maka evaluasi lebih bersifat menilai keberhasilan dan dampak dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Salah satu proses evaluasi dalam perbaikan pengelolaan Museum Multatuli dilakukan dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Evaluasi melalui SKM ini merupakan bentuk pengawasan yang berfokus pada dimensi dampak dan kualitas output dari sudut pandang pengguna layanan berfungsi sebagai instrumen penilaian objektif untuk mengukur sejauh mana

kinerja birokrasi memenuhi harapan masyarakat. Untuk memudahkan pengunjung dalam pengisian SKM, Museum Multatuli memasang *banner* di samping pintu keluar sehingga mudah dilihat pengunjung. Setiap pengunjung museum diarahkan untuk *scan barcode e-IKM* dan mengisi survei pada link tersebut dengan menggunakan *handphone*.



Gambar 12. Banner Scan Barcode e-IKM Access Point Museum Multatuli
Sumber: Peneliti, 2026

Survei indeks kepuasan masyarakat ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Museum Multatuli. Selain itu, survei indeks kepuasan masyarakat juga bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Museum Multatuli. Survei ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengelolaan museum yang lebih baik di kemudian hari. Dengan demikian, Museum Multatuli telah melakukan fungsi pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen untuk melakukan evaluasi dalam pengelolaan museum. Berikut hasil IKM masyarakat terhadap pelayanan Museum Multatuli:



Grafik 3. IKM Masyarakat Terhadap Pelayanan Museum Multatuli Tahun 2021-2024
Sumber: Olah data Peneliti dari RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029, 2026

Grafik 3 menunjukkan tren IKM yang fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Penurunan drastis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Museum Multatuli terjadi pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh dampak berkelanjutan pandemi *Covid-19* dan perubahan kebijakan operasional. Selama masa pandemi *Covid-19* hingga awal 2022, museum seringkali harus tutup atau membatasi kuota kunjungan sesuai aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan penurunan jumlah pengunjung dari 71.965 orang pada 2019 menjadi 5.221 orang pada 2022. Selain itu, mulai tahun 2022, masuk ke Museum Multatuli resmi dikenakan tarif tiket masuk sesuai dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang kemudian disinkronkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelumnya, kunjungan ke museum cenderung tidak dipungut biaya atau bersifat sukarela, sehingga transisi ke sistem berbayar dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas layanan. Berikut tiket masuk Museum Multatuli:



Gambar 13. Tiket Masuk Museum Multatuli
Sumber: Peneliti, 2026

Gambar 13 merupakan tiket masuk ke Museum Multatuli untuk pengunjung umum sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Adapun besaran tarif retribusi pelayanan Museum Multatuli berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

Tabel 6. Tarif Retribusi Pelayanan Museum Multatuli

Kategori Pengunjung	Tarif	
Untuk Umum	Rp. 2.000,-	Per orang
Untuk Anak/Pelajar	Rp. 1.000,-	Per orang
Turis Mancanegara	Rp. 15.000,-	Per orang

Sumber: Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023

Tabel 6 merupakan penerapan tarif retribusi di Museum Multatuli berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi langkah strategis dalam transformasi tata kelola museum dari bersifat sukarela menjadi lebih profesional dan akuntabel. Kebijakan harga yang sangat rendah sengaja dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak agar museum tetap berfungsi sebagai ruang publik yang inklusif sehingga nilai-nilai sejarah anticolonial Multatuli dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan ekonomi. Meskipun secara nominal angka yang ditetapkan sangat terjangkau bagi publik, kebijakan ini menjadi instrumen krusial untuk memastikan keberlanjutan pemeliharaan fasilitas serta peningkatan kualitas pelayanan Museum Multatuli yang lebih terukur bagi pengunjung.

Pendapatan Museum Multatuli berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak melalui retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Berikut perbandingan target dan realisasi pendapatan Museum Multatuli tahun 2022-2024:

Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Museum Multatuli Tahun 2022-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2022	8.000.000	11.225.000	140,31%
2023	40.000.000	49.666.000	124,17%
2024	30.000.000	42.235.000	140,78%

Sumber: Data diolah Peneliti dari LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2024, 2026

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa target pendapatan Museum Multatuli mengalami peningkatan drastis pada tahun 2022 ke 2023 dari Rp. 8.000.000,- menjadi Rp. 40.000.000,-. Target pada tahun 2022 tergolong rendah karena Museum Multatuli baru mulai memberlakukan tiket masuk berbayar pada akhir Oktober 2022 berdasarkan Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023, di mana sebelumnya kunjungan ke museum sepenuhnya gratis. Pada 2023, terjadi kenaikan target secara drastis yang dipicu oleh pemberlakuan tarif retribusi penuh sepanjang tahun serta pemulihan aktivitas pariwisata *pasca* pandemi *Covid-19*. Pada realisasinya, pemerintah daerah mencatat keberhasilan dengan total kunjungan mencapai 25.843 orang sehingga pendapatan riil menembus angka

Rp. 49.666.000,- melampaui target awal. Namun, pada 2024 mengalami penurunan target yakni Rp. 30.000.000,- sebagai langkah evaluasi dan rasionalisasi fiskal dari Pemerintah Kabupaten Lebak. Pada realisasinya, tercatat total kunjungan sebanyak 28.735 orang dengan total realisasi sebesar Rp. 42.235.000,-. Adapun kontribusi pendapatan Museum Multatuli terhadap PAD Kabupaten Lebak, sebagaimana berikut:

Tabel 8. Kontribusi Pendapatan Museum Multatuli Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022-2024

Tahun	Realisasi Museum Multatuli	Realisasi PAD	Persentase
2022	11.225.000,00	421.548.555.369,00	0,00266%
2023	49.666.000,00	434.292.734.733,00	0,01144%
2024	42.235.000,00	417.281.984.162,92	0,01012%

Sumber: Data diolah Peneliti dari LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2024, 2026

Tabel 8 menunjukkan kontribusi dari pendapatan Museum Multatuli terhadap PAD Kabupaten Lebak, di mana mengalami peningkatan dari 0,00266 persen pada 2022 menjadi 0,01144 persen pada 2023 dan sedikit menurun pada 2024 dengan kontribusi 0,01012 persen. Kontribusi Museum Multatuli terhadap PAD Kabupaten Lebak bernilai sangat kecil secara nominal, yaitu di bawah 1 persen, menunjukkan bahwa Museum Multatuli belum menjadi *prime mover* (penggerak utama) fiskal daerah. Fungsi utamanya tetap merupakan layanan publik edukasi dan pelestarian budaya (*public service*), bukan unit komersial murni pencari laba (*profit-oriented*). Namun demikian tarif retribusi yang diberlakukan selama ini bermanfaat untuk perbaikan pada fasilitas yang terdapat pada museum multatuli seperti pemeliharaan koleksi figura bahkan sampai pemeliharaan lampu-lampu, AC dll. Jadi selain untuk kontribusi ke kas daerah, tarif retribusi ini juga untuk pemeliharaan berkelanjutan fasilitas yang ada pada museum.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Museum Multatuli sebagai pusat *edutainment* masyarakat di Kabupaten Lebak sudah berjalan dengan baik melalui penerapan fungsi manajemen *POAC* yang konsisten sehingga Museum Multatuli dapat memperoleh status museum Tipe B pada Desember 2025. Dalam fungsi *planning*, pengelola telah menetapkan visi dan misi strategis yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025–2029 untuk menjadikan museum sebagai pusat ekosistem kebudayaan di Lebak, namun dalam optimalisasi sumber daya terkendala minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dalam fungsi *organizing*, terdapat pembagian tugas yang jelas di bawah kendali Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lebak, namun terkendala pada terbatasnya tenaga teknis sebagai pengelola Museum Multatuli yang menyebabkan tumpang tindih dan beban kerja ganda pada pengelola museum. Pada fungsi *actuating*, terdapat arahan yang jelas dan alur perintah yang sesuai dengan tugas dan kewenangan serta motivasi yang tinggi dari pengelola dalam memajukan Museum Multatuli. Terakhir, fungsi *controlling* dijalankan secara efektif melalui mekanisme monitoring melalui publikasi laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala pada *website* dan media sosial *Instagram*, serta evaluasi rutin melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai dasar pengambilan tindakan korektif demi keberlanjutan layanan Museum Multatuli.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan Museum Multatuli, sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas inklusif. Perlu menyusun rencana anggaran khusus untuk penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, seperti pembuatan *ramp* (jalur landai) yang sesuai standar, pengadaan *guiding block*, serta penyediaan materi edukasi dalam format *braille* atau *audio* agar visi museum sebagai pusat ekosistem kebudayaan yang inklusif dapat terwujud.
2. Optimalisasi sumber daya manusia pengelola. Perlu melakukan analisis beban kerja dan mengajukan penambahan tenaga teknis spesifik (seperti kurator, konservator, atau edukator). Pengelola juga dapat melakukan kerja sama pemagangan dengan universitas.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi interaktif dalam mendukung aksesibilitas dan interpretasi koleksi museum agar meningkatkan pengalaman belajar yang dinamis.
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan manajemen inventarisasi yang lebih detail.
5. Penguatan kepemimpinan dan motivasi melalui pemberian penghargaan (*reward*) atas prestasi kerja dan menyediakan pelatihan pengembangan kompetensi teknis secara berkala.
6. Digitalisasi sistem pengawasan agar data *monitoring* dapat diolah lebih cepat menjadi rekomendasi kebijakan sehingga tindakan korektif terhadap keluhan pengunjung dapat dilakukan secara *real-time*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiarto, L., Tjahjopurnomo., Ibrahim, Y, A., Yogaswara, W., S. Rufaedah, D., Arby, Y., Yulita, I., Yulianto, K., Munandar, A. A., Priyanti. (2012). *Pedoman Museum*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Banten, BPK. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak*. Serang: BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- Bupati Lebak. (2022). *Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha*. Rangkasbitung: Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
- Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian (Diskominfosp) Kabupaten Lebak. (2026). *Museum Multatuli Naik Peringkat, Ditetapkan Museum Tipe B oleh Kementerian Kebudayaan RI*. <https://diskominfosp.lebakkab.go.id/museum-multatuli-naik-peringkat-ditetapkan-museum-tipe-b-oleh-kementerian-kebudayaan-ri/>, diakses 02 Februari 2026.
- Direktorat Museum. (2007). *Pengelolaan Koleksi Museum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Fahrurrozi. (2015). Edukasi Publik untuk Kesejahteraan Sosial: Strategi Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa Meningkatkan Peran Publik untuk Pendidikan. *Akademika*, 20(2): 195-207.
- Hooper-Greenhill, E. (1999). *Museums: Ideal Learning Environment. Museums and Their Visitors*. London: Routledge.
- Imanulloh, M. F., Lisan, L. F., Rahayu, Z. D., Mustafia, P. A., & Fatih, A. A. (2025). Optimalisasi Media Digital untuk Edukasi Publik Dan Dokumentasi Pengabdian Masyarakat di Desa Pogalan. *DHARMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2): 21-36.
- Internasional Council of Museums (ICOM). (August 24, 2022). *Museum Definition*. (<https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>).
- Koutoura, Alikei-Xeni. (December 17th, 2014). *Edutainment in Museums: a Tool for Disseminating Knowledge*. Seminar Researching Arts and Culture, Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum*. Jakarta: Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Munandar, Agus Aris, et al. (2011). *Sejarah Permuseuman di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Permuseuman Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Museum Multatuli. (n.d). *Website Resmi Museum Multatuli*. <https://museummultatuli.id/>, diakses 01 Februari 2026.
- Mossberger, Karen, Caroline J. Tolbert, and Ramona S. McNeal. (2008). *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Pemerintah Provinsi Banten. (2023). *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2043*. Serang: Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Pemerintah Provinsi Banten. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah*. Serang: Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Pemerintah Kabupaten Lebak. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rangkasbitung: Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.
- Pemerintah Kabupaten Lebak. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2025–2029*. Rangkasbitung: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Lebak.
- Posha, B. Y., & Yusnita, H. (2023). Peran Museum Sebagai Pusat Edukasi dan Daya Tarik Wisata Bagi Masyarakat Sambas. *Journal of Community Services*, 1(1): 46-58.
- Prasetyo, D., Manik, T. S., & Riyanti, D. (2021). Pemanfaatan Museum Sebagai Objek Wisata Edukasi. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 15(1): 1-11.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen (Edisi Terjemahan oleh J. Smith & G.A. Ticoalu)*. Jakarta: Bumi Aksara.